



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDIK WIDIYANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3. NHK : 143367

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.015.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/144 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 283 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. Tanah Seluas 2932 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 28.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 64.800.000**

D. SURAT BERTAHAGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 173.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. 33.000.000**

Sub Total **Rp. 1.313.800.000**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.313.800.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.